

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KONSULTAN PAJAK ATAS
PENYALAHGUNAAN LAPORAN PAJAK**



**PRO PATRIA
DIBUAT OLEH :**

KURNIAWAN SANDI

NIM. 02114060

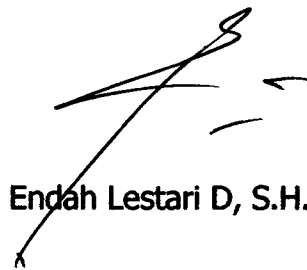
**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2017

Lembar Pengesahan

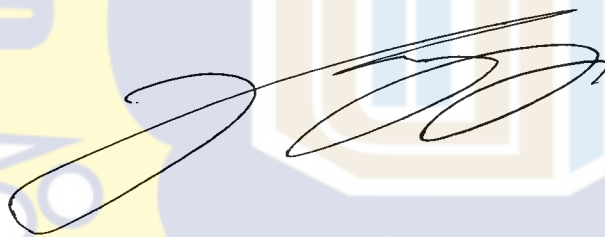
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2017**

Oleh Dosen Pembimbing :



Endah Lestari D, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah Direvisi

Pada tanggal 16 Agustus 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Endah Lestari D, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

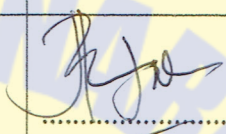




PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : KURNIAWAN SANDI
N I M : 02114060
Tanggal Penilaian : 16 Agustus 2018
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KONSULTAN PAJAK
ATAS PENYALAHGUNAAN LAPORAN PAJAK

Pembimbing : Endah Lestari D, S.H., M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	DR. Nynda Fatmawati, S.H., M.H.	
SEKRETARIS	Endah Lestari D, S.H., M.H.	
ANGGOTA	Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum.	

Surabaya, 16 Agustus 2018
Pembimbing,


Endah Lestari D, S.H., M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan konsultan pajak karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana dalam pengelapan dan penghindaran pajak. Ruang lingkup sanksi pidana dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mencakup setiap orang yang secara langsung terlibat dalam perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan, baik itu karena alpa, sengaja, percobaan, perulangan. Termasuk dalam hal ini adalah atas setiap orang yang secara sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dan menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 (tiga) macam sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Kata Kunci : Kejahatan Konsultan Pajak, Pertanggungjawaban Pidana, pengelapan dan penghindaran pajak, UU KUP

ABSTRACT

Criminal liability is carried out by a tax consultant because there is a mistake which is a criminal act in tax evasion and avoidance. The scope of criminal sanctions in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP) includes every person who is directly involved in an act threatened with criminal sanctions on taxation, whether due to negligence, intentionality, trial, repetition. Included in this case is everyone who intentionally obstructs or complicates the investigation of taxation crimes, and instructs to conduct, advocate, or assist in tax crimes. According to the provisions of the tax law, there are 3 (three) types of criminal sanctions in the form of criminal fines, criminal cage, and imprisonment.

Keywords: Tax Consultant Crime, Criminal Accountability, embezzlement and tax evasion, UU KUP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Permasalahan : Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Teknik Pengumpulan Data	5
1.6 Metode Penelitian	5
1.7 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Hukum	7
1.8 Analisis Bahan Hukum	7
1.9 Sistematika Pembahasan	8

BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH

KONSULTAN PAJAK

2.1 Penegertian Pelaku Tindak Pidana Perpajakan	10
2.2 Bentuk Kualifikasi Kejahatan Perpajakan	11
2.3 Sanksi Perpajakan	22
2.4 Sanksi Hukum Pidana Perpajakan	22
2.5 Daluwarsa Tindak Pidana perpajakan	25

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DIKENAKAN TERHADAP KONSULTAN PAJAK ATAS PENYALAHGUNAAN LAPORAN PAJAK

3.1 Tindak Pidana Perpajakan Dilakukan Oleh Konsultan Pajak Atas Penyalahgunaan Laporan Pajak	26
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Konsultan Pajak Bagi Pelaku Pidana Perpajakan	36
3.3 Proses Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Konsultan Pajak	39

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN

1. Peranan konsultan pajak sangat penting untuk mempengaruhi klien dalam pembayaran pajak. Kejahatan perpajakan yang dilakukan oleh konsultan pajak terkait dilapangan beranekaragaman, karena didasarkan pada berbagai kepentingan kliennya yang hendak dilindungi yang berdampak terutama kepentingan pendapatan negara. Kejahatan di bidang perpajakan memiliki unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”. Kejahatan di bidang perpajakan merupakan awal dari delik pajak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Adapun jenis kejahatan konsultan pajak di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut :

- Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-oleh benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (11); atau
- Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut.

2. Pertanggungjawaban konsultan pajak atas penyalahgunaan laporan pajak dalam hukum pidana berkaitan dengan apakah dalam melakukan perbuatannya, pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab, dalam hukum pidana, berlaku asas *geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*, dimana seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk membuktikan terjadinya delik pajak oleh konsultan pajak, maka diperlukan tahap-tahap penanganan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan UU KUP, antara lain tahap pertama pemeriksaan, tahap kedua penyidikan, tahap ketiga penuntutan dan tahap terakhir pemeriksaan di sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto Dwi Nugroho, 2010, “Hukum Pidana Pajak Indonesia”, Bandung, PT. Citra

Aditya Bakti.

Fidel, 2015, “Kupas Tuntas Kasus Tindak Pidana Perpajakan”, Jakarta, Carofin Media.

Lamintang.P.A.F, 1997, “Ciminal Law-Indonesia”, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2011, “Kejahatan Di Bidang perpajakan”, Jakarta, Rajawali Pers.

Mandiasmo, 2009, “*Perpajakan Edisi Revisi 2009*”, Yogyakarta , Andi Offset.

Simon Nahak, 2014, “Hukum Pidana Perpajakan”, Malang, Setara Press.

Wirjono dan Prodjodikoro, 2003, “Criminal Law”, Edisi:ed.3, Bandung, Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (PPh).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN BM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk kepentingan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 18/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.